

Judul : Pemerintah Menunda Konversi Kompor Listrik
Tanggal : Senin, 26 September 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 13

Pemerintah Menunda Konversi Kompor Listrik

Menko Perekonomian: Belum ada pembahasan anggaran konversi elpiji 3 kg ke kompor listrik

**Aryana Citra Rahayu,
M Krishna Prana Julian**

JAKARTA. Tanpa alasan panjang lebar, pemerintah tiba-tiba menunda program konversi elpiji (LPG) subsidi 3 kilogram (kg) ke kompor listrik. Padahal sebelumnya pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang memproses pengadaan, bahkan sudah menebar kompor induksi ke masyarakat di sejumlah daerah secara gratis.

PLN juga sudah menggelar *market sounding* ke 11 pabrik untuk memproduksi kompor listrik. Perusahaan setrum negara ini menjalani uji coba dengan membagikan kompor listrik beserta alat masak secara gratis untuk 1.000 rumah tangga. Ada tiga kota yang menjadi sasaran uji coba, yakni Denpasar, Solo dan kota di Sumatra Utara. "Kami sedang pengadaan 300.000 kompor listrik," ungkap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, beberapa waktu lalu.

Namun semangat konversi elpiji 3 kg ke kompor induksi belum bisa diteruskan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan konferensi pers bersama Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Jumat (23/9) lalu.

Konferensi pers yang diayunkan di akun Youtube Sekretariat Kabinet itu, Menko Airlangga mengatakan, pemerintah belum akan memulai implementasi program konversi kompor elpiji 3 kg ke kompor listrik atau induksi pada tahun 2022. "Pemerintah belum memutuskan terkait program konversi elpiji 3 kg menjadi kompor listrik induksi, namun dapat dipastikan program ini belum akan diberlakukan pada tahun 2022," ujar dia, Jumat (23/9).

Lebih lanjut, Airlangga mengemukakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum membahas anggaran untuk program konversi kompor elpiji 3 kg ke kompor listrik atau induksi. Dus, belum ada persetujuan anggaran atas program tersebut.

Airlangga memastikan, program konversi ke kompor listrik masih dalam tahap uji coba. Uji coba tersebut dilakukan sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit kompor listrik. Target lokasi adalah Solo dan Bali.

"Hasil dari uji coba ini akan dievaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pemerintah akan menghitung dengan cermat

segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan," tegas Airlangga.

Soal alasan penundaan, Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan *Executive Vice President* Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto tak menjawab pertanyaan KONTAN.

Sedangkan Pertamina sebagai penjual elpiji 3 kg dan elpi-

ji nonsubsidi turut menanggapi. *Corporate Secretary* PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, memasak menggunakan kompor listrik adalah pilihan alternatif masyarakat. "Mau memilih elpiji atau listrik, nanti biar masyarakat sendiri yang menentukan," ungkap dia kepada KONTAN, Minggu (25/9).

Menurut Irto, sejauh ini konsumsi elpiji nonsubsidi di kisaran 5%-6% terhadap total konsumsi elpiji nasional.

Sementara itu, Direktur Ek-

sekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengungkapkan, pemerintah perlu memperjelas program konversi tersebut. "Pengguna elpiji 3 kg adalah penerima subsidi yang kemungkinan daya listriknya juga listrik subsidi," ungkap dia kepada KONTAN, Minggu (25/9).

Jika mereka menjadi sasaran konversi kompor listrik, kata dia, maka harus ada penambahan daya listrik. Hal ini pun akan memunculkan konsekuensi.

Konversi Elpiji Bisa Meresahkan Masyarakat

KOMISI VII Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah tidak menambah resah masyarakat dengan program konversi elpiji (LPG) 3 kilogram ke kompor listrik.

Anggota VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah menghentikan wacana penarikan gas melon elpiji 3 kg bersubsidi untuk digantikan dengan kompor induksi. Sebab, isu ini dapat membuat masyarakat semakin resah setelah menanggung beban berat akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Mulyanto mendesak pemerintah tidak banyak melontarkan wacana yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan bingung di tengah melonjaknya harga pangan dan energi. "Pandemi Covid-19 yang menghantam sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat

baru saja melanda. Isu ini justru akan membuat mereka pulih lebih lambat dan bangkit semakin berat," kata dia.

Justru dalam kondisi seperti ini, Pemerintah seharusnya bisa menenangkan kegelisahan masyarakat. Mulyanto menjelaskan, selama ini di Komisi VII DPR RI, pembahasan soal kompor listrik bersama mitra terkait baru sebatas rencana uji coba. PLN akan membagikan 300.000 kompor induksi kepada masyarakat dalam rangka menyerap surplus listrik yang diterima perusahaan listrik pelat merah tersebut.

"Karena kelebihan setrum itu harus dibayar PLN, baik dipakai atau tidak oleh mereka. Kondisi ini tentu menekan kinerja keuangan PLN," ungkap Mulyanto.